

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA</div>	<div>1721 - A2</div>
	<div>NOMOR : P3/<div><div></div>Pembetulan Ke<div></div>Pembatalan</div></div>	<div>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN<div><div>0</div><div>1</div><div>1</div><div>2</div></div><div>TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN<div><div>2</div><div>0</div><div>2</div><div>5</div></div></div></div>

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 772440087115000	A.5 NAMA JABATAN : Penyuluh Agama Pertama
A.2 NIP/ NRP : 198704062023211016	
A.3 NAMA : MUHAMMAD FIRDAUS, Lc	A.6 JENIS KELAMIN : <div>V</div> LAKI - LAKI <div></div> PEREMPUAN
	A.7 NIK : 1219060604870004
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : IX / IX	A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <div>K / 02</div>

URAIAN			JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>x</div> 21-100-01 <div></div> 21-100-02			
PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI POKOK / PENSIUN		38.947.200
2.	TUNJANGAN ISTRI		3.894.720
3.	TUNJANGAN ANAK		1.557.888
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL		3.240.000
6.	TUNJANGAN BERAS		3.476.160
7.	TUNJANGAN KHUSUS		509
8.	TUNJANGAN LAIN - LAIN		0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )		51.116.477
PENGURANG			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN		2.555.823
11.	IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT		0
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)		2.555.823
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 -13 )		48.560.654
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN )		48.560.654
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		67.500.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21.	PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)		0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		0
23a.	PPh PASAL 21 DI POTONG		0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		0
24a.	PPh PASAL 21 DI POTONG		0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	<div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>8</div> <div>0</div> <div>8</div> <div>8</div> <div>0</div> <div>7</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>5</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div>
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA
D.3 ID Sub Unit Organisasi	:	
D.4 Tanggal	:	<div>1</div> <div>5</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>6</div>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	:	YUNAINI, S.Kom
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
<div></div>		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah